

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adji, Oemar Seno, 1985, *Peradilan Bebas: Negara Hukum*, Erlangga: Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan: Cetakan Pertama*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Harahap, Yahya, 2007, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Harahap, Yahya, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, 2000, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Ketujuh, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- , 2012, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Kedelapan, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Machmud, Syahrul, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia: Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2009*, Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Cetakan Kedua, Liberty: Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 1992, *Hukum Perikatan*, Cetakan Ke III, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Rahmadi, Takdir, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Silalahi, Daud, 2014, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, P.T. Alumni: Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press: Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

LAPORAN PENELITIAN

Mulyono, Bambang H, 2015, *Pengkajian Tentang Pelaksanaan Diklat Sertifikasi Hakim Lingkungan*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta.

Sudewi, Ifa, 2014, *Pengkajian Pelaksanaan Diklat Sertifikasi Hakim Niaga: Laporan Penelitian*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta.

Van Vollenhoven Institute, Universitas Leiden dan BAPPENAS, 2011, *Efektivitas Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia: Rekomendasi Kebijakan*, Jakarta.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2015, *Laporan Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2014*, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup.

Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 Tentang Sertifikasi Lingkungan Hidup.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/III/2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 Tentang Sertifikasi Lingkungan Hidup.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 37/KMA/SK/III/2015 Tentang Sistem Pemantauan dan Evaluasi Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/KMA/SK/III/2014 Tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Ketentuan Pasal 10 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 37/KMA/SK/III/2015.

PUTUSAN

Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo.

Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 131/Pid.B/2013/PN.Mbo.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 015/G/2015/PTUN.Smg.

MAJALAH

Tambunan, Irma, 2015, *National Geographic: Kala Jerebu Menyerbu*, PT. Gramedia Percetakan: Jakarta.

INTERNET

Anonymous, “PT Newmont Divonis Bebas Dalam Kasus Pencemaran Teluk Buyat”, <http://www.antaranews.com/print/60214/pt-newmont-divonis-bebas-dalam-kasus-pencemaran-teluk-buyat>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2015.

Haryono, Yon, “PTUN Semarang Tolak Gugatan Walhi”, <http://krjogja.com/read/256721/ptun-semarang-tolak-gugatan-walhi.kr>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2015.

Mengkaka, Blasius, *Analisis Arti Kamus Dari Kata ‘Sertifikasi’*, www.kompasiana.com, diakses pada tanggal 20 Oktober 2015.

Saturi, Sapariah, “Pakar: Vonis NSP Nodai Keadilan Lingkungan, Mengapa?”, <http://www.mongabay.co.id/2015/01/26/pakar-vonis-nsp-nodai-keadilan-lingkungan-mengapa/>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2015.

Upkpseudorechtspraakfhundip, “PT Newmont Minahasa Raya Pencemar Teluk Buyat”, <https://pseudorechtspraak.wordpress.com/2012/04/06/pt-newmont-minahasa-raya-pencemar-teluk-buyat/>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2015.

WAWANCARA

Wawancara dengan Rudi Suparmono, S.H., M.H, Hakim Yustisial Mahkamah Agung, Sekretaris Kelompok Kerja Lingkungan Hidup Nasional, pada tanggal 1 Februari 2016.

Wawancara dengan Henri Subagiyo, Direktur Eksekutif ICEL, pada tanggal 21 Januari 2016.

Wawancara dengan Haryani Turnip, Deputi Program ICEL, pada tanggal 21 Januari 2016.

Wawancara dengan Dyah Widiastuti, S.H., M.H., Hakim Lingkungan Hidup Bersertifikat pada PTUN Semarang, tanggal 1 Maret dan 17 Maret 2016.

Wawancara dengan Zainal Arifin, S.Hi, Kuasa Hukum para Penggugat dalam Perkara Nomor 015/G/2015/PTUN Smg, Plt Direktur LBH Semarang. Tanggal 10 Maret 2016.